



SUMBER BERITA

JUM'AT, 18 JANUARI 2019

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kontraktor KTL Juga Diusulkan Blacklist

Fisik Baru 37 Persen

PELABAI - Jumlah rekanan pelaksana konstruksi yang bakal diusulkan masuk daftar hitam (blacklist) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lebong, bertambah. Awalnya hanya PT. Bumi Putri Silampari selaku rekanan pelaksana pekerjaan tahap 1 pembangunan Pasar Modern Muara Aman senilai Rp 16,2 miliar yang diusulkan blacklist oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong.

Menyusul, Dinas PUPRHub juga akan mengusulkan blacklist terhadap CV. Najwa Konstruksi selaku kontraktor pelaksana pembangunan Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) senilai Rp 1,15 miliar. Progres fisiknya sesuai hasil opname yang dilakukan Bidang Perhubungan, Dinas PUPRHub hingga tutup tahun anggaran 2018 lebih rendah dari progres fisik Pasar Modern.

"Progres fisik KTL hingga kontrak berakhir baru di angka 37 persen. Atas kondisi itulah

kami memutuskan kontraknya pada tanggal 18 Desember 2018 dan segera mengusulkan blacklist ke ULP. Kami sudah koordinasi ke ULP, tinggal menunggu administrasinya," kata Kabid Perhubungan, Dinas PUPRHub Kabupaten Lebong, Ummi Haidar Rambe, ST, M.Si.

Disentil masih adanya pekerja dari rekanan yang hingga kemarin (17/1) mengerjakan halte, Ummi tidak sempat mendapat informasi dari tim di lapangan. Namun dipastikannya pekerjaan yang masih berlanjut hingga kontrak berakhir itu, tidak akan dihitung lagi. Soalnya Bidang Perhubungan tidak pernah menyetujui perpanjangan kontrak pekerjaan KTL oleh CV. Najwa Konstruksi.

"Ya silakan saja kalau rekanan mau melanjutkan pekerjaan fisiknya. Dasar hitungan tetap disesuaikan dengan hasil opname progres fisik saat jadwal kontrak berakhir," tukas Ummi. Namun ia masih enggan komentar terkait nilai pekerjaan yang telah dibayarkan Dinas PUPRHub kepada rekanan sesuai termin.

Dikonfirmasi, Kabag Layanan Pengadaan, Sek-

retariat Kabupaten (Setkab) Lebong, Syarifuddin, S.Sos, M.Si mengaku sudah menerima informasi dari Dinas PUPRHub terkait pemutusan kontrak proyek KTL. Namun untuk pengusulan blacklist ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pihaknya masih menunggu pengajuan dari Dinas PUPRHub.

"Pada prinsipnya, setelah ada usulan dari OPD (organisasi perangkat daerah, red) teknis, disertai dengan dokumen pemutusan kontrak, pengisian formulir pengajuan blacklist dan data pendukung lainnya, segera kami usulkan ke LKPP untuk penayangan blacklist. Dalam hal ini, wewenang kami hanya bersifat menunggu usulan OPD teknisnya," tutur Syarifuddin.

Pantauan RB, pekerjaan KTL yang tidak tuntas itu meliputi pembangunan 8 unit halte, 1 unit pos pantau dan gapura KTL. Termasuk 56 rambu lalu lintas dan 2 titik traffic light (lampu merah) yang belum terlihat sama sekali terpasang di sepanjang jalan Kecamatan Amen-Lebong Utara-Pelabai. (sca)